

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari peran penting literasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan. Perubahan tersebut menjadikan kondisi masyarakat saat ini berada pada banjirnya informasi, namun minim memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Salah satu bentuknya dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi yang awalnya melalui artikel, berita *online*, buku dan koran beralih kepada konten media sosial dan platform digital.

Nurhayati, 2018 memandang kemudahan akses informasi akan mempengaruhi penyebaran informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pusat pembelajaran semakin penting. Perpustakaan merupakan lembaga informasi yang mengelola berbagai bahan pustaka, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku yang ditulis secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat (Novianti et al., 2023). Perpustakaan sebagai pusat pengetahuan terseleksi, dengan perkembangan sumber informasi di era pengetahuan telah memberi penekanan pada kesadaran individu menjadi pembelajar seumur hidup.

Belajar menjadi proses seumur hidup yang tidak berhenti di lingkup sekolah. Masyarakat dari segala usia mesti memiliki hak dan akses ke pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu jenis perpustakaan yang dapat diakses oleh semua kalangan yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum memiliki hubungan erat dengan masyarakat luas. Dalam undang – undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan umum sebagai perpustakaan yang ditujukan bagi masyarakat luas sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa mengelompokkan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial.

Perpustakaan umum dapat digunakan oleh setiap lapisan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni melayani masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga mahasiswa serta peneliti dan masyarakat umum (Azlin, 2022). Selain itu, perpustakaan diharapkan dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang netral untuk semua kalangan sehingga perpustakaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan melakukan perubahan dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi melalui inovasi dalam layanan yang diberikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) digagas oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2018 (Sartika & Wara Merdeka, 2023). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan

potensinya sehingga, dengan adanya program ini perpustakaan bertransformasi menjadi basis dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan yang sejalan dengan peningkatan budaya literasi. Dalam (Sartika, 2023) memaparkan bahwa program TPBIS ini menjadi bagian dari program prioritas nasional. Program ini di desain agar perpustakaan dapat menjadi dasar dalam pembangunan yang sejalan dengan upaya meningkatkan budaya literasi. Melalui program ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi juga menyediakan pendampingan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Perpustakaan umum seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (Qurbi, 2024). Perpustakaan mulai menjalankan program ini sejak tahun 2020 namun, pelaksanaan kelas-kelas ini mulai aktif di tahun 2022. Dari keikutsertaan program sejak tahun 2020 sampai sekarang, perpustakaan tersebut memiliki peran dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan.

Berdasarkan hasil observasi, bentuk transformasi layanan seperti adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap minggu dengan menyediakan narasumber untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan didukung dengan menyediakan sarana dan prasarana lebih canggih yang disediakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam mengakses buku-buku yang disediakan perpustakaan serta terdapat peran aktif pustakawan dalam melakukan interaksi dengan pengguna pustaka dalam meningkatkan kualitas

daya guna perpustakaan sehingga memajukan kualitas hidup yang lebih baik. Pelatihan ini bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh semua kalangan.

Bentuk pelaksanaan program TPBIS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mencakup kelas kepastakaan, bahasa Inggris, bahasa Jepang, tahsin, rajut, menjahit, dan *publik speaking*. Setiap pelatihan diadakan dengan melakukan pertemuan satu kali dalam seminggu, dan sesi tersebut didampingi oleh narasumber yang memiliki keahlian dalam mengisi kelas. Melalui pelatihan-pelatihan tersebut paradigma perpustakaan berubah. Perpustakaan yang tadinya hanya sebatas tempat sumber informasi, gudang buku dan tempat membaca menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih aktif dan relevan dengan kebutuhan sosial. Saat ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan transformasi dengan menyediakan layanan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengeksplorasi minat bakat dengan menyediakan kelas-kelas pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan merupakan salah satu tujuan dari program TPBIS yang terdapat dalam peraturan Perpustakaan Nasional RI tahun 2023 pada pasal 3 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial. Indikator tersebut akan meningkatkan minat terhadap buku atau bacaan, minat baca yang tinggi dapat menjadi penunjang seseorang memperoleh informasi dari bacaan yang dibacanya dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Namun demikian, tantangan muncul ketika bentuk pelatihan yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tampaknya

mengalami persinggungan dengan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Dalam teori Birokrasi Max Weber, aspek pembagian kerja yang jelas menjadi salah satu faktor utama dalam organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Melalui pembagian kerja yang jelas, setiap organisasi dapat fokus pada tugas berdasarkan kepada keahlian dan bidang organisasi tersebut. Pembagian kerja yang baik akan membantu mengurangi kebingungan dan tumpang tindih tugas, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan literasi dan memberikan pendampingan keterampilan kepada masyarakat melalui bahan bacaan, fokus utamanya sering kali bergeser ke arah pelatihan keterampilan kerja.

Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 tahun 2020 tugas dinas yaitu membantu gubernur menjalankan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Sedangkan fungsi dinas di antaranya: 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, 3) penyelenggaraan administrasi dinas, 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan, 5) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi tersebut menegaskan bahwa kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjadi penyelenggara dari kebijakan

yang diberikan oleh pusat. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perpustakaan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pusat yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang bisa menarik masyarakat umum. Kelas-kelas berbasis keterampilan yang diselenggarakan perpustakaan keluar dari tupoksinya. Hal ini dikarenakan bentuk pelaksanaan program melalui kelas-kelas berbasis keterampilan yang diadakan secara rutin cenderung mendekati fungsi dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam melakukan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Terdapat ketidaksesuaian antara fungsi utama perpustakaan, yang seharusnya berkisar pada peningkatan literasi di era digital dengan pengimplementasian program TPBIS. Program-program yang dilaksanakan saat ini menunjukkan adanya penggeseran tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang tidak sejalan dengan tujuan utama. Penerapan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial seharusnya menjadi jembatan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi di masyarakat tetapi, program ini tampaknya lebih terarah pada pelatihan keterampilan praktis yang berfokus dengan dunia kerja. Akibatnya, perpustakaan belum sepenuhnya berhasil membangun budaya literasi yang kuat dalam era digitalisasi. Pencapaian manfaat penuh dari program diperlukan penyesuaian strategi yang memastikan pelatihan dapat mendorong peningkatan literasi dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan bersamaan.

Idealnya pelatihan ini lebih berfokus pada pengembangan literasi dan keterampilan yang berhubungan dengan akses, pemahaman, dan pemanfaatan informasi untuk memperkuat budaya literasi masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai mengapa kelas-kelas pelatihan keterampilan muncul dalam pelaksanaan program TPBIS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan peran penting dalam pembangunan dengan meningkatkan literasi masyarakat di era digital. Peningkatan literasi ini sangat penting karena membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang datang dari perkembangan informasi. Kemampuan literasi tidak hanya diperoleh melalui sekolah, tetapi juga pusat pembelajaran lainya salah satunya perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebuah kebijakan dibuat dengan tujuan untuk memastikan program yang dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok. Dalam pengimplementasian program inklusi sosial perpustakaan dapat mengembangkan potensi melalui pelatihan yang difasilitasi oleh perpustakaan. Perpustakaan menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibuka untuk umum. Namun, jenis pelatihan yang disediakan oleh perpustakaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada pada lingkup kearsipan dan perpustakaan.

Terdapat gesekan dalam pembagian kerja antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berfokus pada inklusi sosial untuk meningkatkan angka literasi, dengan Dinas Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab atas pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja. Dilihat dari observasi di lapangan, peneliti tertarik untuk meneliti “Mengapa muncul kelas-kelas pelatihan keterampilan dalam Program TPBIS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti ingin mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

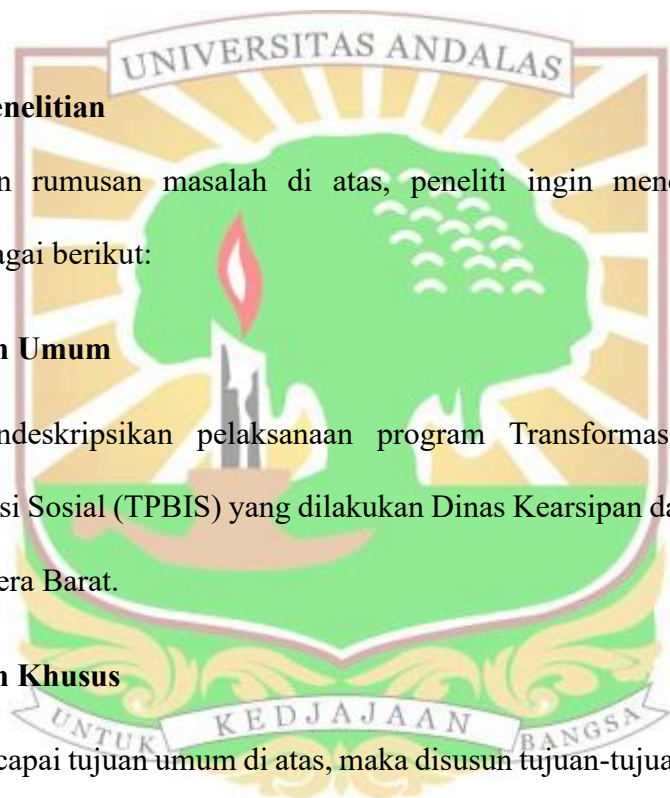
1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum di atas, maka disusun tujuan-tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan awal program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
2. Untuk mendeskripsikan tujuan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian program TPBIS dengan tupoksi perpustakaan



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan literatur dalam penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Sosiologi, terutama bagi studi terkait Sosiologi Organisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pembaca, untuk menjadi bahan referensi kepada pembaca terkait penelitian yang dilakukan mengenai implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1. Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menjadi bahan masukan bagi dinas untuk merancang program yang tidak hanya inklusif tapi juga relevan dengan budaya literasi, sehingga perpustakaan tetap berfungsi sebagai pusat literasi.
2. Bagi pemangku kebijakan, dapat menyediakan data dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah terkait perencanaan program perpustakaan serta menginspirasi kebijakan yang mendukung transformasi perpustakaan sebagai pusat literasi dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Program

Definisi program menurut KBBI (2023) sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Program menjadi tahapan-tahapan untuk penyelesaian rangkaian yang terdapat langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan sehingga, menjadi unsur pertama yang harus ada agar kegiatan

implementasi dapat tercapai. Sebuah program tidak dapat dikerjakan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan.

Selain itu, penjelasan program juga termuat dalam undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Padika, 2016) mengatakan bahwa pelaksanaan suatu program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Dalam proses pelaksanaan suatu program, dapat dikatakan berhasil, kurang berhasil, maupun gagal melalui peninjauan wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*.

1.5.2 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Inklusi sosial berasal dari suatu istilah yang disebut dengan eksklusi sosial yang memiliki arti bahwa masyarakat merasa berbeda dengan masyarakat yang lain (Mahdi, 2020). Kondisi ini berasal dari rasa ketidakmampuan suatu kelompok ataupun individu untuk mempertahankan diri sehingga mereka dapat berintergrasi dengan masyarakat umum. Inklusi sosial dapat menggambarkan proses peningkatan kebutuhan individu dan kelompok agar dapat ikut ke dalam masyarakat. Menurut Istyarini & Lailatur Rohmah (2014) tujuan inklusi sosial

untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peluang kepada pembangunan global.

Menurut Zen dan Wuryani (dalam Mahdi, 2020) perpustakaan umum menjadi standar yang telah ditetapkan oleh Perpustnas RI pada tahun 2011 sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Dalam penerapannya di perpustakaan, konsep inklusi sosial ini cocok untuk diterapkan pada perpustakaan umum. Hal ini dikarenakan perpustakaan umum sebagai lembaga informasi dan sarana pembelajaran bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat secara proaktif membantu individu dan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan serta kepercayaan diri sehingga dapat meningkatkan jaringan sosial.

Perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini sedang melakukan transformasi untuk menjadi pusat kegiatan untuk masyarakat luas. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dirancang oleh Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang mengatur TPBIS dituangkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 03 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan. Hidayat et al. (2022) menjelaskan transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup.

1.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) merujuk pada peran, tanggung jawab dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh individu atau organisasi. Menurut Wahyuni (2017) tugas pokok dan fungsi umumnya merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi yang harus sesuai dengan kemampuan anggota dengan tujuan untuk menyelesaikan program yang dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi organisasi. Masing-masing pegawai dapat melaksanakan kegiatan dengan rinci sehingga dapat dilaksanakan secara jelas dalam setiap bagian unit.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi dasar utama dalam menjalankan berbagai kegiatan dan tanggung jawab organisasi. Tupoksi mencakup berbagai aspek yang dilakukan oleh setiap unit kerja agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan arsip serta dapat digunakan sebagai tempat untuk belajar, mencari dan mengembangkan informasi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, penting untuk merujuk pada peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020 yang mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan tersebut mengenai tugas dinas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Terdapat juga fungsi dinas di antaranya:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, yang termasuk dalam kategori teori klasik dalam bidang sosiologi organisasi. Asumsi dalam teori klasik adalah pada setiap organisasi selalu memiliki susunan rasional dan logis. Birokrasi berasal dari kata *legal-rasional*. Kata rasional dalam organisasi merujuk pada penetapan tujuan dan perancangan organisasi agar mencapai tujuan tersebut. Birokrasi menurut Weber adalah bentuk organisasi yang terstruktur secara hierarkis, dimana keputusan dan tugas dibagi secara jelas dan berdasarkan pada aturan yang rasional. Organisasi itu legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan, prosedur dan peranan yang dirumuskan dengan jelas (Supartha & Desak Ketut Sintaasih, 2017).

Konsep weber tentang birokrasi sangat berbeda dengan pandangan umum yang melihat pada sisi negatif birokrasi (Ambarwati, 2018). Weber menggambarkan tipe birokrasi yang ideal dari sudut pandang positif, ia menilai organisasi birokrasi sebagai organisasi rasional dan lebih efisien. Tipe birokrasi yang ideal tidak mencakup tipe otoritas atau hubungan lain, konspirasi maupun memiliki badan komite. Dalam pandangan Weber, birokrasi yang ideal adalah sistem yang terstruktur dengan baik sehingga setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini dapat memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan efektif.

Salah satu alasan pokok penyebab organisasi birokratis memiliki efisiensi adalah karena organisasi tersebut memiliki cara yang sistematis untuk menghubungkan kepentingan individu dan tenaga pendorong dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Hal ini dijamin oleh kenyataan bahwa dalam melaksanakan fungsi organisasi terdapat aturan khusus yang menjadi kegiatan utama bagi pegawai birokrasi. Selain itu, Weber juga menyoroti pentingnya pemisahan antara kehidupan pribadi dan profesional dalam birokrasi. Dikeluarkannya elemen pribadi dari birokrasi berarti orang-orang dapat menjalin hubungan dalam organisasi meskipun tidak mengenal satu sama lain. Hal ini akan membawa keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan pribadi. Birokrasi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Max Weber mengonsepsikan tipe ideal untuk menggambarkan birokrasi. Model tipe ideal dalam birokrasi menurut Weber yaitu birokrasi mempunyai suatu bentuk pasti ketika suatu fungsi dijalankan dalam cara yang rasional. Melalui tipe ideal ini, Weber berpendapat bahwa birokrasi jika dilihat dari aspek teknis murni adalah

bentuk organisasi yang paling mampu untuk mencapai tingkat rasional dan efektivitas yang maksimal. Weber menyusun sebuah modal birokrasi yang berisi beberapa karakteristik berikut:

1. Struktur Hierarkis

Struktur hierarkis dapat ditunjukkan dari adanya posisi di atas dengan posisi rendah. Tujuan dari penetapan hierarki ini adalah melalui jenjang otoritas yang jelas akan memastikan bahwa setiap jabatan dikelola secara sistematis oleh jabatan tertentu lainnya. Setiap tingkat dalam hierarki memiliki tanggung jawab kepada tingkat yang lebih tinggi yang menciptakan rantai komando yang jelas.

2. Pembagian Kerja atau Spesialisasi

Aspek pembagian kerja diharapkan kepada kesesuaian kemampuan individu. Setiap posisi atau jabatan memiliki bidang kompetisi tersendiri yang tugas dalam organisasi dibedakan secara tegas dari jabatan lain. Dalam melaksanakan berbagai tugasnya, organisasi birokrasi membagi kegiatan administratif menjadi bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu dan berbeda dengan fungsi bagian lainnya. Weber berpendapat bahwa tugas-tugas dalam organisasi harus dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih spesifik kemudian diberikan kepada individu yang memiliki keahlian khusus.

3. Pejabat Diangkat Berdasarkan Kompetensi

Weber menekankan pentingnya seleksi berbasis keahlian teknis untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditunjuk memiliki kemampuan

untuk menjalankan tugas dengan efektif. Hal ini menggambarkan bahwa prinsip dasar birokrasi modern untuk memisahkan hubungan pribadi dengan kepentingan politik dari proses administrasi.

Dari karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi harus berfungsi secara objektif untuk mencapai efisiensi diperlukan hierarki yang jelas, terdapat pembagian kerja dan pejabat yang diangkat berdasarkan kompetensi. Teori birokrasi Weber diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kerangka dalam memahami bagaimana struktur organisasi modern, termasuk pemerintahan dirancang untuk menjalankan fungsi administratif dengan efisiensi dan rasionalitas. Dalam penelitian ini dinas pemerintahan dapat dikatakan sebagai organisasi birokratis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pemerintahan, biasanya memiliki struktur hierarki yang jelas dengan berbagai tingkatan jabatan serta memiliki tanggung jawab yang spesifik.

Pembagian kerja dalam birokrasi sangat erat kaitannya dengan keberadaan dinas-dinas yang memiliki tugas yang berbeda. Masing-masing dinas mempunyai tugas dan fungsi yang diatur oleh pemerintah. Pembagian kerja ini dapat mengurangi adanya pengerjaan satu tugas oleh dua jabatan yang berbeda dan juga meminimalkan perselisihan antar pejabat (Halevy, 2011). Penetapan pejabat berdasarkan kualifikasi menjadikan para pejabat berada pada level pengetahuan dan kompetensi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Weber tentang pembagian tugas, hierarki dan kompetensi pejabat. Namun, program inklusi sosial yang dijalankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Weber, Birokrasi yang ideal beroperasi berdasarkan aturan formal yang dirancang untuk memastikan rasionalitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan program yang di luar tugas dinas menunjukkan kemungkinan penyimpangan, baik karena tekanan eksternal maupun kepentingan internal birokrat. Weber menyampaikan bahwa birokrasi dapat tidak bekerja jika birokrat mempunyai kepentingan sendiri.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dalam sebuah penelitian, diperlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu akan menjadi pedoman dan perbandingan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa Penelitian relevan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

Tabel 1 1 Penelitian Relevan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iradayati Kurniasih dan Rahmat Setiawan	Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar (2021)	Perpustakaan Karanganyar telah berhasil melakukan transformasi layanan melalui penerapan program inklusi sosial. Dalam membuat program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan bekerja	Topik utama mengenai program inklusi sosial pada perpustakaan. Menggunakan pendekatan Kualitatif.	Fokus penelitian. Teori yang digunakan.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sama dengan pemerintah swasta, komunitas maupun individu yang berada di sekitar perpustakaan untuk membantu jalanya program.		
2.	Ajeng Istyarini dan Lailatur Rohmah	Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur (2024)	Perpustakaan sudah melakukan program sejak ditetapkan menjadi penerima bantuan program pada tahun 2023. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan program seperti sumber daya yang terbatas, penyelenggaraan anggaran dan fasilitas yang kurang memadai. Dalam mengatasi hambatan tersebut perpustakaan dengan pendampingan tiap daerah serta upaya dalam menyelenggarakan regulasi untuk dasar anggaran.	Pembahasan mengenai pengimplementasian program TPBIS.	Tujuan penelitian. Teori yang digunakan.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Aisya Tul Ummah	Implementasi Program Kota Literasi Versi UNESCO di Kota Padang Panjang (2024)	Pelaksanaan program belum berhasil diwujudkan. Bidang kreatif yang dipilih adalah literasi. Pada pelaksanaannya terjadi miskomunikasi antara agen pelaksana program. Serta pergantian kepala dinas juga mempengaruhi keberhasilan program karena terdapat perbedaan sikap terhadap keberlangsungan literasi.	Topik mengenai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam menjalankan program untuk meningkatkan literasi, serta adanya inovasi program dalam mengembangkan budaya literasi masyarakat.	Program dalam penelitian ini adalah program literasi versi UNESCO. Lokasi penelitian
4.	Serlina Agustin dan Yona Primadesi	Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten	Indikator perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu: 1) Aspek connectivity mencakup fasilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, upaya menjangkau pemustaka belum terlaksana secara efektif dan juga sistem penelusuran bahan	Topik membahas mengenai pelaksanaan program TPBIS dengan yang dijabarkan melalui beberapa aspek.	Fokus penelitian, lokasi penelitian.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Padang Pariaman)	pustaka OPAC yang tidak berfungsi dengan baik. 2) Aspek content, dari segi koleksi dan sosialisasi belum tersedia dan menjangkau masyarakat secara menyeluruh. 3) Aspek human, dari segi respon masyarakat masih kurang, keterbatasan anggaran, jaringan kemitraan belum meluas.		

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian relevan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa relevansi keempat penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai program inklusi sosial yang dijalankan oleh perpustakaan dalam yang sejalan dengan peningkatan budaya literasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diselenggarakan oleh perpustakaan berupa kelas pelatihan berbasis keterampilan. Kelas-kelas tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perpustakaan. Sehingga fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini akan membedakannya dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Menurut Afrizal (2014) metode penelitian merupakan cara peneliti untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian mengacu kepada sudut pandang yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Afrizal, 2014). Melalui pendekatan ini data yang dikumpulkan kaya dan mendalam sehingga dapat dianalisis untuk menghasilkan temuan yang bermakna. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan berbagai informasi, dalam hal ini informasi yang akan diperoleh tentu berupa kata-kata ataupun perilaku individu maupun kelompok yang terjadi dalam masyarakat.

Pada penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi pelaksanaan program TPBIS di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan mendeskripsikan suatu proses maupun realitas yang merupakan fokus penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi untuk mengumpulkan data serta mengamati secara detail terkait pelaksanaan program inklusi sosial oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian dibutuhkan dalam penelitian sebagai sumber informasi sekaligus subjek penelitian. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai dirinya maupun orang lain dalam wawancara mendalam. Informan penelitian hendaklah orang yang memahami maksud dan tujuan serta masalah penelitian. Terdapat dua kategori informan, yaitu informan pelaku dan informan pengamat.

Informan pelaku merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi tentang pikiran dan tindakan bahkan pengetahuan mereka mengenai fokus masalah yang diteliti. Informan pelaku berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti. Penentuan dan pemilihan informan pelaku harus disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Informan pengamat merupakan individu atau kelompok yang memberi informasi mengenai orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan ini menjadi saksi dari suatu kejadian. Informan pengamat dalam penelitian ini merupakan narasumber dan peserta yang mengikuti program.

Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam memilih informan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menentukan kriteria informan yang menjadi sumber informasi agar data yang diperoleh spesifik dan kuat bagi kebutuhan penelitian. Kriteria informan digunakan untuk mengetahui identitas orang yang dipilih menjadi informan penelitian bahkan sebelum penelitian

dilakukan (Afrizal, 2014). Dapat disimpulkan bahwa teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan penelitian berdasarkan adanya ciri-ciri ataupun kriteria informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti menetapkan kriteria informan pelaku sebagai berikut:

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Program TPBIS.
3. Panitia kelas-kelas program TPBIS.

Selanjutnya, kriteria informan pengamat sebagai berikut:

1. Narasumber dalam kelas pelatihan.
2. Peserta program yang mengikuti pelatihan setiap minggu.
3. Peserta yang sudah menjadi anggota perpustakaan.

Tabel 1 2 Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Bidang	Jabatan/Profesi	Kategori Informan
1.	Fajri Rahmad Ersya, S. STP., M. Si	Laki-laki	Layanan	Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerja Sama	Informan Pelaku
2.	Yelvi Oktavia S. IP	Perempuan	Administrasi	Pustakawan Ahli Madya	Informan Pelaku
3.	Rozi S. IP	Perempuan	Layanan	Ketua Tim Layanan Perpustakaan	Informan Pelaku
4.	Widya Kumala Sari, S. IP	Perempuan	Layanan	Pustakawan	Informan Pelaku
5.	Sari Maya Gusti, S. IPUST	Perempuan	Layanan	Pustakawan Ahli Pertama	Informan Pelaku

6.	Silvi Yatri, S. IP	Perempuan	Layanan	Pustakawan Ahli pertama	Informan Pelaku
7.	Imam Ardana, S. SSI	Laki-laki	Layanan	Pustakawan Ahli Pertama	Informan Pelaku
8.	Devitra Melvatra	Laki-laki	Layanan	Pustakawan	Informan Pelaku
9.	Melya Kiki Wirianingsih, S. Hum	Perempuan	-	Guru SMA Negeri 07 Padang	Informan Pengamat
10.	Wira Gusman	Perempuan	-	Wirausaha UMKM Rajut	Informan Pengamat
11.	Tri Prima, S. Kom	Perempuan	-	Wirausaha UMKM	Informan Pengamat
12.	Delyanis	Perempuan	-	Ibu Rumah Tangga	Informan Pengamat
13.	Annisa Yasmin	Perempuan	-	Wirausaha	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer di Lapangan

1.6.3 Data yang Diambil

Penelitian kualitatif mengumpulkan data yang pada umumnya berupa kata-kata baik tertulis ataupun lisan dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa upaya untuk mengangkat data yang diperoleh (Afrizal, 2014). Dalam bukunya Sugiyono (2013) membagi data berdasarkan sumbernya yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

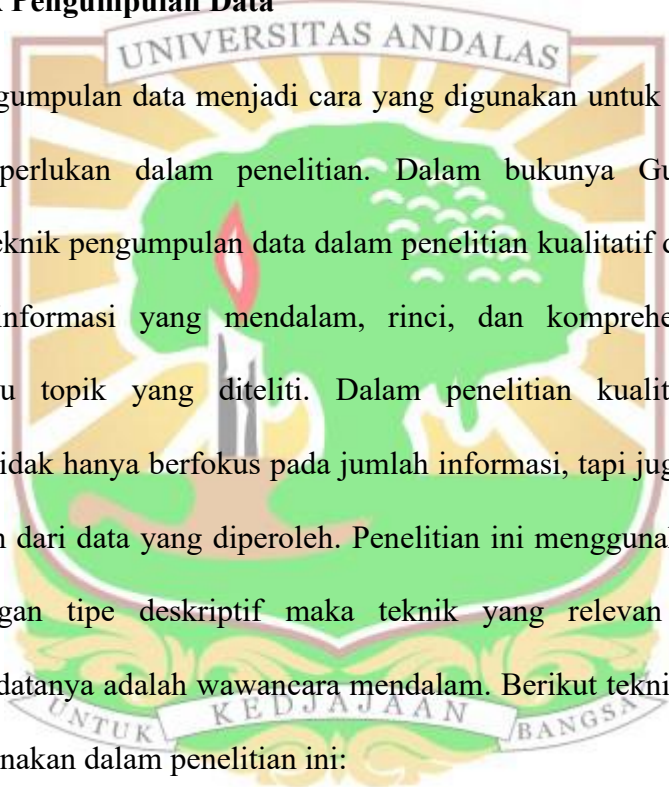
1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari informan sehingga dapat memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui observasi, wawancara mendalam dengan anggota atau staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, narasumber kelas pelatihan, peserta pelatihan.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber datanya misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku teori sosiologi, organisasi, sosiologi birokrasi, website Perpustakaan Nasional RI, data penelitian sebelumnya mengenai program TPBIS.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Teknik pengumpulan data menjadi cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam bukunya Gustaman et al. menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam, rinci, dan komprehensif mengenai fenomena atau topik yang diteliti. Dalam penelitian kualitas, data yang dikumpulkan tidak hanya berfokus pada jumlah informasi, tapi juga pada kualitas dan kedalaman dari data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif maka teknik yang relevan dalam proses pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara Mendalam

Melalui wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari informan serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara langsung (Gustaman et al., 2024). Dalam memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Menurut Afrizal (2014)

wawancara mendalam didefinisikan sebagai sebuah interaksi sosial yang bersifat informal antara peneliti dengan informan.

Pada wawancara mendalam perlu dilakukan berulang-ulang kali, hal ini bukan hanya untuk menggali informasi dari informan tapi juga digunakan untuk mengklarifikasi informasi maupun memahami hal-hal yang muncul dalam mewawancarai informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan umum yang kemudian dikembangkan saat wawancara dilakukan sehingga memperoleh informasi dari informan mengenai pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai agen-agen yang berperan dalam pelaksanaan program TPBIS. Proses wawancara dimulai pada 10 Maret 2025 dengan tujuan untuk melengkapi data dan memastikan data yang kurang pada kritik dan saran saat seminar proposal kepada staf perpustakaan. Peneliti mewawancarai dua staf perpustakaan, di antaranya staf yang saat ini menjadi ketua panitia dan staf yang pernah bertanggung jawab pada periode 2022 sampai 2023.

Selanjutnya, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berguna untuk memandu peneliti agar wawancara berjalan secara sistematis. Setelah pedoman wawancara disetujui, peneliti menghubungi pihak Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mengajukan surat izin penelitian pada 14 April 2025. Peneliti mengajukan surat izin tersebut pada

tanggal 16 April dan memperoleh surat balasan melalui aplikasi *Whatsapp* pada tanggal 22 April 2025.

Pada tanggal 8 Mei 2025 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yelvi selaku informan pelaku di ruangannya. Saat ini Ibu Yelvi berada pada bagian administrasi. Beliau pernah menjadi ketua panitia program TPBIS dari pertengahan 2022 hingga pertengahan tahun 2023. Meskipun masa beliau menjadi ketua tim, kelas-kelas yang dibuka pada saat itu berjalan secara aktif dan terdapat juga kelas yang bekerja sama dengan pihak luar seperti Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat.

Setelah melakukan proses wawancara, peneliti menanyakan prosedur untuk mewawancarai kepala bidang. Ibu Yelvi menyarankan untuk menemui Ibu Rozi terlebih dahulu sebelum mewawancarai kepala bidang layanan. Pada tanggal 14 Mei 2025 peneliti menghubungi Ibu Rozi untuk melakukan wawancara, tetapi beliau saat itu mengikuti acara lomba tingkat SMA yang diselenggarakan oleh perpustakaan sehingga wawancara tidak jadi dilakukan. Pada tanggal 19 Mei 2025 peneliti mewawancarai informan pelaku, Kak Sari di Perpustakaan. Kak Sari menjadi penanggung jawab kelas bahasa Inggris dan staf bidang layanan. Pada hari yang sama peneliti juga mewawancarai Kak Widya, peneliti mewawancarai beliau karena mengikuti pembekalan awal program TPBIS secara keseluruhan.

Pada tanggal 20 Mei 2025, peneliti menemui Kak Silvi di ruangannya. Kak Silvi merupakan informan pelaku karena pernah menjadi narasumber kelas *make up* yang pernah diselenggarakan tahun 2020 dan dibuka lagi

tahun 2023 meskipun pada tahun ini tidak aktif lagi. Selanjutnya peneliti menemui Bang Imam yang merupakan informan pelaku. Bang Imam berada di bidang promosi dan pernah menjadi penanggung jawab kelas bahasa Jepang. Pada hari yang sama, peneliti menemui Pak Devit yang juga menjadi informan pelaku. Beliau juga merupakan suami dari narasumber kelas rajut.

Pada tanggal 28 Mei 2025, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan ketua tim saat ini yaitu Ibu Rozi sebagai informan pelaku. Setelah melakukan wawancara mendalam peneliti meminta saran Ibu Rozi mengenai prosedur mewawancarai Kepala Bidang layanan. Pada awalnya Ibu Rozi menyarankan untuk menunggu konfirmasi terlebih dahulu sebelum mewawancarai Kepala Bidang. Namun, karena Ibu Rozi memiliki jadwal yang padat beliau menyarankan peneliti untuk menemui Kepala Bidang secara langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang pada tanggal 23 Juni 2020.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber sebagai informan pengamat dengan menghubungi narasumber melalui *WhatsApp*. Informan membalas dan bersedia di wawancarai pada tanggal 4 Juni 2025 di SMA Negeri 07 Padang. Peneliti mewawancarai Ibu Kiki yang mengisi kelas bahasa Jepang. Pada hari yang sama peneliti melakukan wawancara di rumah Ibu wira yang merupakan narasumber kelas rajut. Selanjutnya, peneliti ke Perpustakaan untuk menemui informan Kak Tri yang merupakan

peserta kelas bahasa Jepang. Pada saat wawancara dilakukan, Kak Tri sedang mengikuti kelas kerajinan makrame yang dibuka oleh perpustakaan.

Pada tanggal 13 Juni 2025, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Ibu Delyanis yang menjadi peserta kelas rajut. Peneliti melakukan wawancara tersebut pada sesi kelas merajut di adakan. Pada tanggal 20 Juni 2025 dilakukan wawancara mendalam dengan Kak Annisa sebagai informan pengamat.

2. Observasi

Informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari informan, hasil dari pengamatan juga dapat digunakan untuk menggambarkan situasi informan. Observasi tidak terbatas kepada orang, tatapi juga menggunakan objek-objek alam lainnya untuk menambah informasi (Sugiyono, 2013). Melalui panca indera, peneliti dapat menggunakannya sebagai alat dari pengumpulan data observasi. Peneliti melakukan observasi terlibat dengan melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka. Pengamatan langsung dengan mengamati lokasi pelaksanaan program dan aktivitas dari kelas-kelas pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan.

Observasi dimulai dengan menghadiri kelas-kelas yang dibuka oleh perpustakaan. Pada awal tahun 2025, hingga Juni 2025 terdapat masih aktif diadakan setiap minggu seperti kelas rajut, bros akrilik, kerajinan tali giok, kreasi kawat bulu, dan makrame. Tidak hanya kelas-kelas pelatihan peneliti juga melakukan observasi pada kegiatan wisata literasi yang dihadiri oleh siswa sekolah.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis merujuk kepada elemen yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan komponen penelitian. Untuk menentukan kriteria objek penelitian, unit analisis data sangat penting dalam penelitian kualitatif. Unit analisis dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok, organisasi, dan lembaga, instansi, atau institusi sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini, unit analisis yang dipilih adalah kelompok, khususnya institusi pemerintah dalam penelitian ini yaitu Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data memegang peranan penting untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan. Menurut Afrizal, analisis data adalah suatu proses yang sistematis digunakan untuk menentukan bagian-bagian yang saling berkaitan serta menghasilkan klasifikasi dari keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Peneliti perlu menginterpretasikan dan mengelompokkan data kemudian mencari hubungan antara dua kelompok tersebut sehingga data dapat dianalisis. Pada Penelitian kualitatif analisis data berlangsung dari awal hingga tahap penulisan laporan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean data dengan memberikan nama atau pengkodean terhadap hasil penelitian. Tahap

pengkodingan dilakukan dengan menulis ulang catatan-catatan lapangan dari hasil wawancara atau membuat transkrip wawancara. Setelah itu, peneliti akan memilah informasi yang penting dan tidak penting dengan memberikan tanda-tanda sehingga dapat diidentifikasi data yang perlu untuk menjawab masalah penelitian (Afrizal, 2014).

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan bagian lebih lanjut dari analisis, peneliti menyajikan hasil mereka dalam bentuk kategori dan pengelompokan data dengan menggunakan matriks dan diagram sehingga data mudah diinterpretasikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi merupakan fase lanjutan di mana peneliti menarik kesimpulan dari informasi yang telah mereka kumpulkan dari wawancara atau dokumen. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian melakukan pengecekan kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses kodifikasi dan penyajian data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan.

1.6.7 Definisi Operasional

Operasional dari konsep-konsep yang digunakan agar penelitian dapat semakin jelas. Berikut adalah operasional konsep yang digunakan:

- 3.1. Program merupakan rancangan yang memuat tahapan-tahapan dalam proses mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan penerapan program dan layanan perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

3.3. Literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca dan menulis ditandai dengan kemampuan untuk memahami pernyataan singkat serta dapat menggunakan informasi dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan dapat berkomunikasi secara efektif.

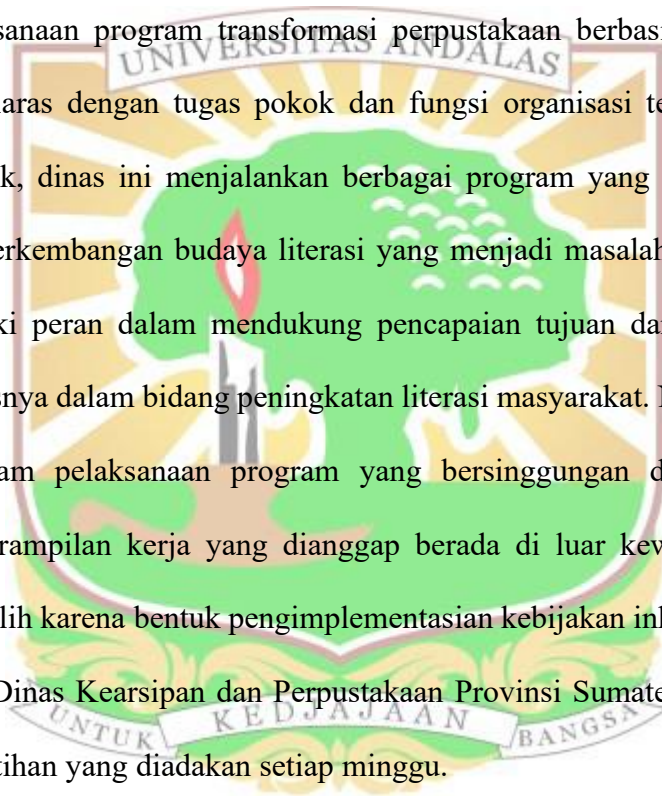
3.4. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan kerangka kerja resmi yang ditetapkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh suatu lembaga, unit kerja, atau individu untuk mencapai tujuan organisasi. Tupoksi diatur dalam sebuah regulasi sehingga dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang jelas.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Menurut Afrizal (2014) lokasi penelitian merupakan tempat yang akan menjadi fokus untuk melaksanakan penelitian, yaitu area atau lingkungan dimana proses penelitian akan dilakukan. Afrizal (2014) juga menjelaskan bahwa tempat penelitian tidak harus mengacu pada sebuah wilayah namun juga dalam bentuk organisasi dan sejenisnya. Pada penelitian ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjadi lokasi penelitian dilakukan. Dinas

ini merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan arsip dan pengembangan pelayanan perpustakaan. Lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada relevansi fokus penelitian, yaitu mengenai analisis pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai lembaga publik, dinas ini menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan budaya literasi yang menjadi masalah di masyarakat. Dinas memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan dan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang peningkatan literasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan program yang bersinggungan dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang dianggap berada di luar kewenangan dinas. Lokasi ini dipilih karena bentuk pengimplementasian kebijakan inklusi sosial yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berupa pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap minggu.



1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai dari Maret 2025 hingga Agustus 2025 saat sidang penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3 Rancangan Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	2025					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Seminar Proposal						
2.	Instrumen Penelitian						
3.	Pengumpulan data						
4.	Analisis Data						
5.	Penyusunan Laporan						
6.	Sidang Skripsi						